



PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENAGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA BANDUNG

Annisa Three Handayani P.P¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Titin Rohayatin³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Masalah yang dihadapi pemerintah kota Bandung terkait dengan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan semakin meningkat, dan perlu ditangani secara serius oleh Dinas Sosial Kota Bandung melalui sosialisasi program, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta penerapan kebijakan yang lebih ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lain yang mendukung. Penelitian dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Bandung, dengan kurun waktu pengumpulan data antara Februari hingga Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung masih belum efektif dalam menangani pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Meskipun sudah berusaha melaksanakan program dengan cara yang benar dan baik, namun ketersediaan sumber daya dinas tersebut masih minim. Penelitian memberikan saran agar Dinas Sosial Kota Bandung menegakkan peraturan daerah terkait kesejahteraan sosial, membuat program sosialisasi kepada masyarakat, memastikan penurunan jumlah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan setiap bulannya, memberikan pembinaan dan pelatihan bagi mereka, serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin.

Kata Kunci: Kota Bandung, Dinas Sosial, PMKS.

Abstract

The problems faced by the Bandung city government related to beggars, vagrants, and street children are increasing, and need to be handled seriously by the Bandung City Social Service through program socialization, good coordination with local governments, and the implementation of more ideal policies. This study aims to describe and analyze the role of the Social Service in dealing with people with social welfare problems, especially beggars, vagrants, and street children in Bandung City. This study uses a descriptive qualitative method with data collected from interviews, field notes, personal documents, and other supporting official documents. The study was conducted at the Bandung City Social Service office, with a data collection period between February and August 2024. The results of the study indicate that the

Bandung City Social Service is still ineffective in dealing with beggars, vagrants, and street children. Although they have tried to implement the program in a correct and good way, the availability of resources for the service is still minimal. The study provides suggestions for the Bandung City Social Service to enforce regional regulations related to social welfare, create socialization programs for the community, ensure a decrease in the number of beggars, vagrants, and street children every month, provide guidance and training for them, and carry out routine supervision and control.

Keywords: Bandung City, Social Services, PMKS.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menangani masalah sosial bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Di Kota Bandung, masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran dan pekerja sektor informal semakin meningkat. Fenomena ini menimbulkan permasalahan lain seperti pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Pengemis, gelandangan, dan anak jalanan menjadi semakin banyak dan marak di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung pun harus menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna menangani masalah ini. Namun, kadar pemulung dan gelandangan dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat dan perlu ditangani secara serius oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Meskipun telah ada upaya penanganan seperti razia dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memasang CCTV, kegagalan pemerintah dalam menangani masalah sosial masih terlihat. Kebijakan pemerintah belum diterapkan secara optimal, norma sosial dan komunikasi antara Dinas Sosial dengan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan juga masih kurang. Diharapkan peran Dinas Sosial Kota Bandung dapat lebih efektif dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial melalui sosialisasi program, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta penerapan kebijakan yang lebih ideal dalam menangani pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung. Sehingga, Pembangunan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung dapat

berjalan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam menanggulangi PMKS khususnya pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu untuk mencari perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti teliti dengan tujuan lain untuk menghindari kesamaan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai perbandingan dan referensi yang akan diteliti. Tujuan penelitian di antaranya adalah untuk memahami pengertian peran, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), faktor-faktor penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani PMKS. Pengertian peran mencakup norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menangani PMKS menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Faktor-faktor penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk hambatan sosial, moral, dan material. Pelayanan publik terhadap PMKS, hingga sekarang belum optimal. Dari sisi regulasi sudah diatur, tetapi implementasinya masih setengah hati. Dinas Sosial Kota Bandung merupakan lembaga Pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial berperan penting dalam

penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dialami oleh Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan ketenagakerjaan, penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pelayanan umum di bidang sosial, dan penanggulangan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Kerangka pemikiran penelitian ini didasari oleh teori peran dan konsep tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta peran Dinas Sosial Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Dinas Sosial Kota Bandung berperan dalam menangani PMKS dan bagaimana kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dapat mengurangi beban Pemerintah dalam menangani PMKS. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kebijakan serta program-program penanggulangan PMKS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi serta dokumen resmi lain yang mendukung. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (2016: 4): “Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.”. Dengan melalui metode penelitian kualitatif, maka instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri yang berarti bahwa penelitian tersebut ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam mengalisis data, dengan melalui teknik analisis data yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan alat yang mendukung dalam

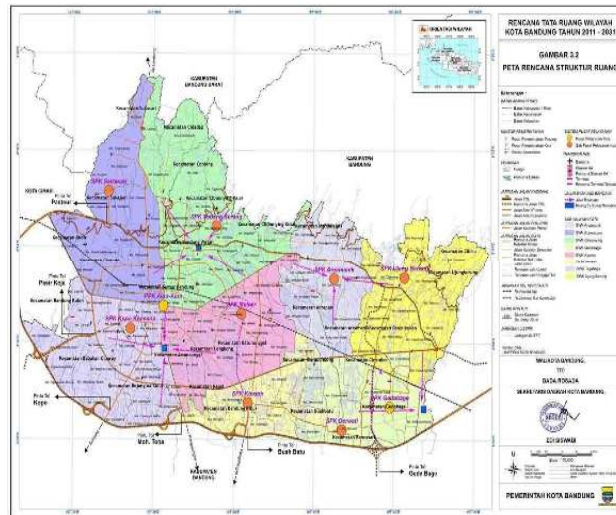
penelitian ini yaitu, Pedoman Wawancara, Laptop, HP, dan Kendaraan Bermotor guna mendukung peneliti dalam penelitian.

Teknik analisis data pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, ditampilkan dalam laporan, dan diambil kesimpulannya. Pengambilan kesimpulan bersifat sementara dan masih akan berkembang seiring dengan penelitian di lapangan. Dalam kesimpulan, peneliti menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Bandung dengan beberapa informan, serta kurun waktu pengumpulan data yang cukup lama, yakni dari Februari hingga Agustus 2024. *Literary research and support media were used to obtain material, and the study involved observation, in-depth interviews, and documentation.*

PEMBAHASAN

Letak Geografi Kota Bandung Kota Bandung merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat dan menjadi kota terbesar di provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara $107^{\circ} - 430^{\circ}$ Bintang Timur dan $6^{\circ} 00 - 6^{\circ} 20$ Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung merupakan lapisan alluvial hasil dari letusan gunung tangkuban perahu. Jenis material bagian utara dan pusat kota merupakan jenis andosol, dibagian selatan serta timur tersebar jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Iklim asli Kota Bandung

dipengaruhi oleh pegunungan disekitar, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab dan temperature rata-rata kota adalah 25°C.



Sumber : Website Resmi Dinas Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2024

Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Bandung adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial, telah berubah dari Kantor Sosial Kota Bandung menjadi Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2008. Perubahan ini dilakukan karena adanya masalah sosial yang memerlukan pemecahan yang segera, sehingga dibentuklah Dinas Sosial Kota Bandung dengan visi tercipta suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang adil dan damai. Dinas Sosial Kota Bandung memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Tugas Dinas Sosial Kota Bandung adalah melaksanakan perbaikan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kota Bandung memiliki

struktur organisasi dengan unit-unit kerja yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang partisipasi sosial dan masyarakat, bidang rehabilitasi sosial, bidang pelayanan sosial, dan bidang pembinaan rawan sosial. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Dalam mencapai visi dan misinya, Dinas Sosial Kota Bandung akan mengoptimalkan semua sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang yang dimilikinya.

Gambaran Umum Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Menurut Dinas Sosial Kota Bandung, mereka yang termasuk dalam kategori anak jalanan adalah anak berusia lima sampai 18 tahun dan berkeliaran di jalan atau tempat umum minimal empat jam/hari dalam kurun waktu satu bulan, ada beberapa ciri-ciri anak jalanan jika dilihat dari fisiknya yaitu: *1. Pakaian tampak kumuh karena jarang dicuci; 2. Terlihat dekil dan kumuh karena jarang mandi; 3. Mereka memiliki kulit yang kotor; 4. Rambutnya kotor kemerah-merahan; 5. Bau kurang sedap.* Penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Gelandangan yang dikarenakan kurang mampu memenuhi kebutuhan sehingga turun kejalan, sering melakukan beberapa hal untuk bertahan hidup dengan cara melakukan aktivitas di beberapa sektor informal, di Kota Bandung sendiri menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung, Gelandangan pada umumnya melakukan hal-hal sebagai berikut: *1. Pemulung barang-barang bekas; 2. Mengemis; 3. Mengamen; 4. Mencuri.*

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Kesejahteraan sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dimana pembangunan kesejahteraan

sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mengacu pada peraturan di atas, Pemerintah Kota Bandung mencari kekuatan untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran seperti perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sementara itu, orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sanggup secara mandiri dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggembala di tempat umum sering disebut sebagai gelandangan. Anak jalanan merupakan korban berbagai penyimpangan dari orang tua atau keluarga mereka. Anak jalanan sering mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dan kurang mendapatkan hak-hak dasar seperti anak-anak pada umumnya. Gelandangan sering mengalami berbagai masalah dalam kesehariannya, seperti tindak kekerasan, penggunaan minuman keras, dan penggunaan narkoba. Dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemerintah membuat beberapa program penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang bersifat pemberdayaan sampai benar-benar keluarga tersebut mandiri. Pemerintah juga bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menangani masalah kesejahteraan sosial ini, dengan tujuan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa hidup

mandiri secara ekonomi. Selain itu, Dinas Sosial menyatakan bahwa pengemis termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dengan berbagai alasan. Ada beberapa kategori pengemis menurut Dinas Sosial Kota Bandung, seperti yang tidak berdaya sama sekali, yang melakukan pengemis karena sudah menjadi kegiatan ekonomi yang menggiurkan, yang

melakukan pengemis musiman, yang mengemis karena miskin mental, dan yang terkoordinasi dalam suatu sindikat.

Program penanganan masalah kesejahteraan sosial ini penting untuk dilakukan, karena banyak masalah sosial yang dapat diatasi jika upaya penanganannya serius dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Anak jalanan perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka bisa mengembangkan potensi, bakat, serta keinginan mereka untuk mencapai cita-cita dalam hidupnya. Gelandangan juga perlu mendapat perhatian khusus untuk membantu mereka keluar dari kehidupan yang penuh dengan masalah. Dengan upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga sosial, penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Karakteristik Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah lama berlangsung dalam masyarakat kita. Pemerintah memiliki tugas untuk mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, tetapi memiliki tujuan yang sama. Nilai-nilai tersebut membentuk jati diri dan budaya bangsa, seperti keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilihat sebagai investasi sosial berkelanjutan yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial, seperti pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial, merupakan bagian penting dari potensi kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan tugas pokok kesejahteraan sosial termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial merupakan bagian dari agenda utama. Kota Bandung menghadapi berbagai permasalahan sosial, seperti pengemis, gelandangan, dan anak jalanan, dan membutuhkan

pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Meskipun Kota Bandung memiliki indeks Pembangunan sumber daya manusia yang tinggi, namun berbagai permasalahan sosial masih relatif tinggi. Hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah pengemis, Gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung yakni sebagai berikut :

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Pengemis	4.126 org
2.	Gelandangan	948 org
3.	Anak jalanan	4.821 org

Sumber : Dinas sosial Kota Bandung 2024

Peningkatan jumlah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung disebabkan oleh kemiskinan yang mendorong orang untuk menjalani profesi tersebut. Penyelenggaraan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012. Mereka melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat dan ingin menangani masalah ini secara komprehensif. Dinas Sosial Kota Bandung saat ini memiliki 56 pegawai dan membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mencapai target yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya.

Peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Studi Kasus Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan di Kota Bandung.

Peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dinas Sosial Kota Bandung memiliki peran dalam mensosialisasikan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 di Kota Bandung.

Mereka melakukan sosialisasi melalui media massa, media elektronik, dan media sosial. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung memanfaatkan media massa seperti koran dan televisi, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web. Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang dibagi kedalam beberapa bagian. Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan, untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase (bukan kalimat) secara ringkas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung (Studi Kasus Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Proses Norma/Aturan Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung belum efektif dikarenakan pada Dinas Sosial maupun Dinas terkait dalam penyampaiannya informasi mengenai Aturan, Wewenang, dan program yang dilaksanakan belum intens dan belum semua masyarakat mengetahui apalagi masyarakat yang kurang paham dengan media sosial dan tidak memiliki media elektronik. Walaupun begitu tetapi sudah melauai cara yang benar dan baik.

Dalam Peran sebagai Konsep Perilaku Ketersediaan Sumber Daya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung yang dimiliki oleh Dinas Sosial terlihat masih minim sehingga sangat mempengaruhi akan belum sepenuhnya terlaksana terkait Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung terutama pada Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan.

Peran Sebagai Perilaku Individu pada Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung mulai dari sikap pelaksana maupun tingkat kepatuhan pelaksana sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari sudah adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Dinas Sosial tersebut untuk melaksanakan programnya masing-masing dalam mencapai tujuannya, terlebih jika komunikasi antara aparatur Dinas Sosial dengan aparatur yang terkait terjalin dengan baik sehingga masyarakat juga menyadari dan merasakan akan terlaksananya Penyelenggaraan dan

Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bajari, Atwar. 2015. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Creswell, John. W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edy Sudarhono, Teori Peran (Konsep, Derivasidan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 3.
- Fahrudin. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Dr. Rahmi Widyanti, M. (2019). Perilaku Organisasi (teori dan konsep jilid 1). Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
- Prof. Dr. J. Winardi, S. (2003). Teori Organisasi Pengorganisasian. Jakarta: PT RajaGraflindo Persada, Jakarta.

JURNAL:

- Asyhari, Farid. (2016). Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Atau Pmks (Studi Kasus Korban Narkotika/Napza). Paradigma. Volume 04 Nomor 03.
- Fadri, Zainal. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta. Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat islam, 10(1).
- Tannia, Rachman Dian. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya. hal 662-672.

Loberta, Nanta. (2014). Strategi Bertahan Hidup “Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan” Di Perkotaan. Hal 20 Vol 1

DOKUMEN:

Undang-Undang 1945 pasal 34 tentang hak- hak Pelayanan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2015, tentang kesejahteraan
Sosial

Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Dan
Penanganan Kesejahteraan sosial

WEB:

<http://dinsos.bandung.go.id/>